

**IMPLEMENTASI WASH (WATER, SANITATION, AND HYGIENE)  
UNICEF DALAM MEWUJUDKAN SANITASI DAN KETERSEDIAAN  
AIR BERSIH DI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2019-2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AUFADINA SCIENTICOVA**

20323340

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**IMPLEMENTASI WASH (WATER, SANITATION, AND HYGIENE)  
UNICEF DALAM MEWUJUDKAN SANITASI DAN KETERSEDIAAN  
AIR BERSIH DI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2019-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AUFADINA SCIENTICOVA**

20323340

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI WASH (WATER, SANITATION, AND HYGIENE)  
UNICEF DALAM MEWUJUDKAN SANITASI DAN KETERSEDIAAN  
AIR BERSIH DI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2019-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

3 Juli 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
3. Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
4. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

*Hadza*

*Derina*

*Mohammad*

*Gustri*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 3 Juli 2024*



---

*Aufadina Scienticova*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	15
1.9 Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB 2 KONDISI SANITASI DAN AIR BERSIH SERTA UNICEF DI NUSA</b>	
<b>TENGGARA BARAT.....</b>	<b>17</b>
2.2 Kondisi Sanitasi dan Air Bersih di Nusa Tenggara Barat.....	17
2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Buruknya Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih di NTB.....	21
2.2.2 Dampak dari Buruknya Sanitasi dan Air Bersih di NTB.....	23
2.3 Respons Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam isu Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih.....	28
2.4 Kerja sama UNICEF-RI dalam Country Program Action Plan (CPAP)....	30
2.4.1 WASH UNICEF di Nusa Tenggara Barat.....	31
<b>BAB 3 IMPLEMENTASI DAN UPAYA UNICEF DALAM MEWUJUDKAN</b>	
<b>SANITASI DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI NTB.....</b>	<b>34</b>
3.1 Management Approach.....	34
3.1.1 Monitoring.....	35

3.1.1.1	Monitoring UNICEF Bekerja sama dengan BAPPENAS dan Kementerian PUPR.....	37
3.1.1.2	Monitoring UNICEF Bekerja sama dengan Mitra Pembangunan (BAZNAS NTB).....	38
3.1.2	Capacity Building and Problem Solving.....	39
3.1.2.1	Capacity Building melalui WASH.....	40
3.1.2.2	Bantuan Layanan WASH UNICEF di NTB.....	42
3.2	Normative Approach.....	45
3.2.1	Otoritas dan Legitimasi UNICEF dalam Implementasi WASH di Nusa Tenggara Barat.....	46
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Rekomendasi.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 10 Besar Penyakit di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019	25
Tabel 2. Implementasi Kebijakan Organisasi UNICEF dalam Mewujudkan Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih di NTB	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional	9
Gambar 2. Jumlah KK Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Tahun 2019	18
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2019	18
Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Minum Tahun 2019	20

## DAFTAR SINGKATAN

BASNO	: Buang Air Besar Sembarangan Nol
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CPAP	: <i>Country Programme Action Plan</i>
CTPS	: Cuci Tangan Pakai Sabun
IO	: <i>International Organization</i>
IPLT	: Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja
JMP	: <i>Joint Monitoring Programme</i>
KK	: Kartu Keluarga
KHA	: Konvensi Hak Anak
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MKM	: Manajemen Kebersihan Menstruasi
NTB	: Nusa Tenggara Barat
ODF	: <i>Open Defecation Free</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PKBI	: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
POKJA AMPL	: Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
POKJA PPAS	: Kelompok Kerja Pembangunan, Perumahan, Permukiman, Air, dan Sanitasi
RI	: Republik Indonesia
RPKD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RISKESDAS	: Riset Kesehatan Dasar

SDM	: Sumber Daya Manusia
SDG'S	: <i>Sustainable Development Goals</i>
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
WASH	: <i>Water, Sanitation, and Hygiene</i>
WASH FIT	: <i>Water, Sanitation, Hygiene, Facility Instrument Tools</i>
YKMI	: Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia

## ABSTRAK

Fasilitas sanitasi dan ketersediaan air bersih yang terbatas di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyebabkan masyarakat masih melakukan praktik buang air besar sembarangan dan menggunakan sumber air minum yang tidak aman. Kondisi tersebut meningkatkan risiko paparan terhadap penyakit yang berasal dari lingkungan yang terkontaminasi oleh tinja manusia seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio. UNICEF sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan perempuan, memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan sanitasi dan pasokan air bersih di NTB melalui program air, sanitasi, dan kebersihan (WASH). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB tahun 2019-2023 menggunakan konsep teori implementasi organisasi internasional. Dengan pendekatan manajerial, penelitian ini menggambarkan bagaimana UNICEF melakukan upaya nya melalui kegiatan pemantauan, peningkatan kapasitas, dan juga penyelesaian masalah. Selain itu, UNICEF juga bekerja dengan sangat terbuka dan transparan sesuai dengan karakteristik pendekatan manajerial.

**Kata Kunci:** UNICEF, Nusa Tenggara Barat, NTB, Sanitasi, Air Bersih, Organisasi Internasional

## ABSTRACT

*Sanitation facilities and the limited availability of clean water in West Nusa Tenggara Province mean that people still practice open defecation and use unsafe drinking water sources. This condition increases the risk of exposure to diseases originating from an environment contaminated by human feces, such as cholera, diarrhea, dysentery, hepatitis A, typhus, and polio. UNICEF is an international organization that focuses on providing children's and women's rights, playing an important role in helping improve sanitation and clean water supplies in NTB through Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) programs. This research aims to describe UNICEF's efforts to realize sanitation and clean water availability in NTB in 2019-2023 using the concept of international organization implementation theory. With a management approach, this research looks at how UNICEF carries out its efforts through monitoring, capacity building, and problem solving. Apart from that, UNICEF also works very openly and transparently in accordance with the characteristics of a management approach.*

**Keywords:** UNICEF, West Nusa Tenggara, NTB, Sanitation, Clean Water, International Organization

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sanitasi dan ketersediaan air bersih merupakan dua hal yang paling mendasar bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia (United Nations 2022). Namun, sayangnya isu mengenai buruknya sanitasi dan ketersediaan air bersih merupakan isu global yang tak kunjung usai hingga saat ini. Menurut data dari *United Nations Sustainable Development Goals* pada tahun 2022, terdapat sekitar 2,2 miliar orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap air bersih, dan ada sekitar 3,5 miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang baik (United Nations 2022). Hal ini menunjukkan masih banyaknya jumlah orang yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih di dunia.

Minimnya akses terhadap sanitasi dan air bersih tentu memicu masalah baru, yaitu rentannya terpapar berbagai bakteri dan penyakit seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio (World Health Organization 2023). World Health Organization (WHO) memperkirakan ada sekitar 1 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit diare yang disebabkan oleh air minum, sanitasi, dan kebersihan tangan yang tidak aman. *“Some 1 million people are estimated to die each year from diarrhea as a result of unsafe drinking-water, sanitation and hand hygiene”* (World Health Organization 2023).

Negara Republik Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang yang masih belum memiliki kualitas air bersih dan sanitasi yang baik. Pada tahun 2022 terdapat sekitar 250 juta orang di Indonesia masih kekurangan akses terhadap fasilitas sanitasi yang dikelola secara aman (UNICEF

dan Bappenas 2024). Sebesar 90% orang terhubung dengan fasilitas sanitasi yang buruk yang dapat mencemari lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi anggota rumah tangga, dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak (UNICEF dan Bappenas 2024). Dari hasil data tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara yang masih mengalami urgensi terkait isu sanitasi dan ketersediaan air bersih hingga saat ini.

Data dari UNICEF Indonesia juga menyebutkan hampir 25 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses ke toilet atau jamban, sehingga mereka melakukan buang air besar di tempat-tempat terbuka seperti ladang, semak-semak, hutan, parit, jalanan, sungai, atau area terbuka lainnya (UNICEF Indonesia 2019). Data dari UNICEF Indonesia pada tahun 2020 juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya terdapat 140.000 balita meninggal akibat penyakit diare yang disebabkan oleh pengelolaan air limbah yang kurang baik, sebanyak 93% air limbah yang berasal dari toilet tidak menjalani proses pengolahan di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) (Veska 2020). Sehingga hal tersebut secara langsung mencemari sumber air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan esensial bagi masyarakat dan anak-anak.

Isu mengenai buruknya sanitasi dan ketersediaan air bersih di Indonesia sudah menjadi permasalahan serius yang ditangani oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target perbaikan sanitasi dan air bersih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia periode 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 100% air minum layak, 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta menurunkan angka Buang Air Besar Sembarangan

(BABS) hingga 0% pada tahun 2024 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022). Dikutip dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2022, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuatnya untuk mewujudkan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang salah satu tujuannya adalah “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta Berkelanjutan Bagi Semua” (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2022). Dalam pelaksanaan target perbaikan sanitasi dan air bersih, pemerintah Indonesia tidak hanya bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi juga bekerja sama dengan organisasi internasional. Salah satu contoh organisasi internasional yang bekerja sama dengan Indonesia adalah UNICEF.

UNICEF atau singkatan dari *United Nations Children’s Emergency Fund* merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang kemanusiaan terutama untuk membantu dan melindungi hak anak-anak dengan fokus pada program keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan sanitasi, serta kebijakan sosial (UNICEF Indonesia 2020). UNICEF merupakan singkatan dari *United Nations International Children’s Emergency Fund* atau Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1953 UNICEF memiliki misi yang lebih luas dan fokus dana UNICEF beralih ke program-program umum untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang masih berkembang dan dalam situasi darurat. UNICEF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1948 dengan tujuan

awalnya adalah memberikan bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (UNICEF Indonesia 2020).

Pentingnya sanitasi dan air bersih sebagai bagian dari hak anak-anak, maka isu lingkungan mengenai buruknya sanitasi dan minimnya ketersediaan air bersih menjadi salah satu isu yang ditangani oleh UNICEF. Salah satu misi atau tujuan UNICEF adalah untuk membantu berbagai negara di seluruh dunia yang masih menerapkan sanitasi kurang baik dan sulit mengakses pasokan air bersih dengan mengusung program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) secara global, termasuk ke negara Indonesia. UNICEF bekerja sama dengan Negara Republik Indonesia dengan menandatangani *Country Program Action Plan* (CPAP) yang bertujuan untuk percepatan pemenuhan hak anak yang salah satu programnya adalah pemenuhan hak anak dalam *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Kerja sama UNICEF-RI ini memiliki delapan fokus wilayah, diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Papua, dan Papua Barat (Kementerian PPN/Bappenas 2020).

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan kompleks terkait sanitasi dan air bersih. Pada tahun 2019 masih terdapat sebanyak 169.886 Kartu Keluarga (KK) di NTB yang sama sekali tidak memiliki akses fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) (Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2020). Keadaan atau kemampuan ekonomi masyarakat Provinsi NTB menjadi faktor penting karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk membangun berbagai fasilitas sanitasi seperti jamban, wastafel cuci tangan, pipa air minum dan fasilitas sanitasi lainnya. Selain itu,

masyarakat Provinsi NTB masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai sanitasi sehingga kesadaran akan lingkungan dan hidup bersih pun belum dapat terlaksana dengan baik (Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019).

UNICEF menjalin kerja sama dengan Negara Republik Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam kerja sama *Country Program Action Plan* (CPAP) periode 2021-2025 dengan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023 yang mengusung visi “Membangun NTB yang Gemilang” dan salah satu misinya adalah “NTB Sehat dan Cerdas” dengan meningkatkan program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar dan pengembangan lingkungan sehat dalam rangka mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) agenda 2030 dengan tujuan nomor enam, yaitu mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua. UNICEF datang ke wilayah NTB dalam misinya yang meliputi tiga komponen program, yaitu kesehatan, perlindungan anak, dan kebencanaan (Sudarmadi 2021). Program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) UNICEF dalam mendukung kebijakan RPJMD NTB memanfaatkan dana APBN, dana hibah, dana desa, dana dari mitra pembangunan seperti BAZNAS (POKJA AMPL Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) UNICEF sebagai organisasi internasional dalam membantu mewujudkan sanitasi dan kersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019-2023. Rentang waktu penelitian ini mengacu pada implementasi WASH dengan mendukung arah kebijakan

pemerintah provinsi NTB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimulai pada tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2023 terkait program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar dan pengembangan lingkungan sehat di NTB.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang mengenai Implementasi WASH UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019-2023, terdapat rumusan masalah sebagai landasan dalam mengkaji penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) UNICEF dalam membantu mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB tahun 2019-2023?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB tahun 2019-2023

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini memiliki cakupan yang terbatas pada penggambaran upaya dan keterkaitan UNICEF dengan pemerintah Indonesia dalam mencapai sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) selama rentang tahun 2019-2023. Rentang waktu tersebut dipilih mengacu pada Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB periode 2019-2023 yang mengusung visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dengan salah satu misi

nya adalah “NTB Sehat dan Cerdas” dengan meningkatkan akses sanitasi yang layak untuk mencapai sanitasi aman di tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat serta implementasi *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) UNICEF dalam mendukung mewujudkan peningkatan sanitasi dan ketersediaan air bersih yang lebih baik di wilayah tersebut pada periode tahun 2019-2023.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Isu Mengenai sanitasi dan ketersediaan air bersih telah menjadi subjek yang mendapat perhatian besar dari para peneliti, mengingat pentingnya sanitasi dan air bersih sebagai hak dan kebutuhan dasar bagi semua individu. Isu yang tak kunjung usai hingga saat ini mendorong beberapa peneliti untuk meneliti berbagai peristiwa yang terkait dengan isu sanitasi dan ketersediaan air bersih di dunia. Berbagai penelitian mengenai upaya UNICEF dalam menghadapi tantangan sanitasi dan ketersediaan air bersih sudah banyak diteliti, namun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti upaya UNICEF di wilayah NTB. Sejumlah jurnal yang mencakup topik yang serupa akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang upaya UNICEF dalam membantu mengatasi masalah sanitasi dan ketersediaan air bersih.

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Rudyansyah (2019) yang berjudul *Peran United Nation Childrens Fund (UNICEF) dalam Mengatasi Masalah Sanitasi di Papua* membahas mengenai analisis peran UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi di Papua melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Jika dilihat dari perspektif kerja sama internasional, program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) mengatasi permasalahan sanitasi di Papua

dalam bentuk kerja sama internasional antara UNICEF dan pemerintah Indonesia. Dalam artikel jurnal ini memakai konsep kerja sama internasional sebagai acuan analisis peran UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi di Papua (Rudyansyah 2019).

Dalam artikel jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Asri Wulandari (2019) yang berjudul *Peranan UNICEF dalam Memulihkan dan Memperbaiki Layanan Air Bersih dan Sanitasi di Aceh* membahas mengenai analisis program dan tantangan yang dihadapi UNICEF dalam memulihkan dan meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi di Banda Aceh melalui program rehabilitasi pemeliharaan instalasi air minum, desain dan rekonstruksi jaringan pipa air, penyediaan air di pedesaan, rehabilitasi instalasi pengolahan limbah dan peningkatan kapasitas PDAM (Wulandhari 2019).

Dalam artikel jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Annisa Asti Nur Auliya dan Indra Kusumawardhana (2020) yang berjudul *UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India* membahas tentang peran UNICEF dalam mengatasi masalah sanitasi di India melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Penelitian ini menggunakan teori peran organisasi internasional untuk menjelaskan dan menekankan UNICEF dalam menjalankan perannya berdasarkan nilai-nilai yang ditetapkan oleh organisasi internasional (Kusumawardhana dan Nur Auliya 2020).

Dari ketiga penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa persamaan dalam hal topik yang dibahas, yaitu peranan UNICEF dalam upaya mengatasi sanitasi dan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah melalui program *Water,*

*Sanitation, and Hygiene* (WASH). Namun, ada juga perbedaan yang membedakan penelitian penulis dengan ketiga penelitian tersebut, yaitu lingkup wilayah. Penelitian penulis berfokus pada wilayah Nusa Tenggara Barat, sedangkan ketiga penelitian tersebut berfokus pada wilayah Papua, Aceh, dan India. Selain lingkup wilayah, kerangka pemikiran teori yang digunakan pun berbeda. Penulis menggunakan kerangka pemikiran teori implementasi organisasi internasional, sedangkan ketiga penelitian tersebut menggunakan teori kerja sama internasional, teori konstruktivis, dan juga teori peran organisasi internasional.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas upaya dari suatu organisasi internasional yaitu UNICEF dalam upaya mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) pada tahun 2019-2023. Penulis akan menggunakan teori implementasi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek dalam buku yang berjudul “*International Organizations and Implementation Enforcers, Managers, Authorities?*”.

**Gambar 1. Tiga Pendekatan Implementasi Organisasi Internasional**

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
<b>Resources</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports</li> <li>• <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports</li> <li>• <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Authority and legitimacy</i></li> </ul>

Sumber: International Organizations and Implementation

Berdasarkan teori implementasi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek dalam bukunya yang berjudul “*International Organizations and Implementation Enforcers, Managers, Authorities?*” Terdapat tiga pendekatan dalam teori implementasi organisasi internasional, yakni:

1. *Enforcement approach*

Pendekatan penegakan hukum dalam implementasi perjanjian internasional menekankan tindakan yang bersifat memaksa dan menggunakan sanksi adalah cara yang paling tepat untuk memastikan kepatuhan suatu negara kepada perjanjian internasional. Teori ini berdasarkan logika konsekuensialis, di mana negara-negara dianggap sebagai aktor rasional yang telah mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keterlibatan mereka dalam perjanjian dan jika terjadi kecurangan atau salah satu negara tidak patuh dan melanggar perjanjian internasional, maka konsekuensinya adalah mendapatkan sanksi dan dipermalukan. Pendekatan ini mengharapkan bahwa organisasi internasional dapat mempengaruhi implementasi melalui dua alat, yaitu pemantauan dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Pemantauan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti laporan dan inspeksi lapangan oleh perwakilan organisasi internasional. Sedangkan sanksi dapat berupa *naming and shaming*, yaitu tindakan memermalukan negara pelanggar di hadapan publik dengan menetapkan denda uang, serta sanksi militer dan ekonomi

akibat tidak patuh dan melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh organisasi internasional (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007).

## 2. *Management approach*

*Management approach* atau pendekatan manajerial dalam implementasi perjanjian internasional menekankan pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka, berlawanan dengan *enforcement approach* yang melakukan tindakan keras dengan pemberian sanksi. Pendekatan manajerial melihat keputusan untuk mematuhi perjanjian sebagai proses interaksi yang berupaya membangun kembali keseimbangan dan keuntungan di antara pihak yang terlibat. Faktor-faktor seperti ketidakjelasan perjanjian, keterbatasan sumber daya, dan perubahan sosial atau ekonomi dapat mempengaruhi keputusan suatu negara untuk mematuhi perjanjian internasional. Perspektif manajerial menekankan *problem solving* atau pemecahan masalah, pembangunan kapasitas, penafsiran aturan, dan transparansi sebagai pendekatan yang lebih efektif daripada penegakan hukum yang bertindak keras seperti *enforcement approach*. Pendekatan manajerial mengharapkan organisasi internasional dan badan-badan lainnya dapat berperan penting dalam memberikan bantuan teknis, interpretasi perjanjian, dan bantuan keuangan untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan komitmen mereka terhadap perjanjian internasional (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007).

## 3. *Normative approach*

Selain *enforcement approach* dan *management approach*, ada juga *normative approach* atau pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang

menekankan kekuatan normatif organisasi internasional dalam upaya mempengaruhi negara-negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang sudah disepakati bersama. *Normative approach* tidak menggunakan kekuatan fisik atau sanksi, melainkan menggunakan argumen yang logis untuk meyakinkan negara-negara bahwa mematuhi perjanjian internasional adalah hal yang tepat dan benar untuk dilakukan. Pendekatan ini mencoba untuk membangun legitimasi dan otoritas dengan menunjukkan bahwa mereka adalah sumber kebijakan yang netral dan dapat dipercaya. Pendekatan ini juga mendorong negara-negara untuk mengikuti standar internasional dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007).

Berdasarkan tiga pendekatan dalam teori implementasi organisasi internasional yang telah diuraikan diatas, penulis akan menggunakan *management approach* dan *normative approach* sebagai kerangka teori untuk menganalisis implementasi UNICEF sebagai organisasi internasional dalam upaya mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019-2023. Penulis melihat bahwa *management approach* dan *normative approach* merupakan pendekatan yang paling tepat dalam menganalisis upaya UNICEF dalam membantu Provinsi Nusa Tenggara Barat mewujudkan sanitasi dan air bersih.

*management approach* dan *normative approach* adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi internasional dalam menerapkan kebijakannya. Dalam hal ini, UNICEF membantu negara-negara dalam mencari solusi untuk masalah

sanitasi dan air bersih, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan oleh suatu negara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya UNICEF melakukan *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. UNICEF juga menyuarakan norma sosial dengan melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi NTB bahwa sanitasi dan air bersih adalah hal penting yang perlu dilaksanakan. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi WASH UNICEF dalam mengatasi isu sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB menggunakan *management approach* dan *normative approach*.

### **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan teori implementasi organisasi internasional menurut Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek, sementara dapat disimpulkan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan anak dan haknya, memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019-2023. UNICEF menggunakan *management approach* dan *normative approach* dalam implementasi program WASH di NTB. UNICEF menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mencapai sanitasi dan air bersih. Dalam konteks RPJMD 2019-2023 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), UNICEF berperan dalam mendukung arah kebijakan pemerintah provinsi NTB. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB. Namun, dengan kerja sama yang kuat antara UNICEF, Pemerintah Provinsi NTB, mitra pembangunan, dan masyarakat NTB diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi WASH UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB pada tahun 2019-2023. Implementasi WASH UNICEF tersebut dapat mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih, penurunan angka penyakit terkait air dan sanitasi, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengadopsi praktik sanitasi yang lebih baik.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam dengan menganalisis masalah secara terperinci dan memahami konteksnya melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis studi kepustakaan atau sumber data sekunder. Sumber data yang dipergunakan meliputi buku, jurnal, situs web, serta laporan resmi dari UNICEF dan Pemerintah Provinsi NTB yang telah terbukti kevaliditasannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah UNICEF sebagai organisasi internasional. Sedangkan objek penelitian adalah implementasi WASH (*Water, Sanitation, and Hygiene*) UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini akan menganalisis implementasi WASH UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019-2023 menggunakan teori implementasi kebijakan organisasi internasional.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan pendekatan studi pustaka dari sumber-sumber terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data diperoleh melalui buku elektronik (*e-book*), jurnal yang telah dipublikasikan, artikel daring, dokumen dan laporan resmi dari UNICEF dan Pemerintah Nusa Tenggara Barat, serta data yang tersedia secara resmi di situs web pemerintahan atau lembaga non-pemerintah.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Dalam proses penelitian, langkah awal yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi sumber-sumber data yang relevan seperti laporan UNICEF, publikasi ilmiah, data pemerintah, dan data statistik yang berkaitan dengan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB. Setelah itu, penulis melakukan pengumpulan data dengan cermat untuk kemudian diolah dan dianalisis guna memberikan interpretasi dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dibagi ke dalam empat bab, berikut adalah sistematika penulisannya:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan beberapa sub-bab yang diantaranya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II: KONDISI SANITASI DAN AIR BERSIH SERTA UNICEF DI NUSA TENGGARA BARAT

Pada bab kedua ini akan membahas kondisi sanitasi dan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat, faktor dan dampak negatifnya, serta kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan sanitasi dan ketersediaan air bersih. Bab ini juga akan membahas profil sejarah dan tujuan UNICEF di NTB untuk memberikan gambaran lengkap tentang konteks sanitasi dan air bersih di wilayah tersebut.

## BAB III: IMPLEMENTASI WASH UNICEF DALAM MEWUJUDKAN SANITASI DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI NTB

Pada bab ketiga ini akan menganalisis implementasi WASH UNICEF dalam meningkatkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat selama periode 2019-2023. Bab ini akan membahas implementasi kebijakan WASH UNICEF melalui berbagai program sanitasi dan air bersih di NTB dengan menggunakan teori implementasi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan manajerial dan pendekatan normatif.

## BAB IV: PENUTUP

Pada bab keempat ini meliputi kesimpulan dan rekomendasi penulis terhadap penelitian ini. Pada bagian ini, juga akan disampaikan saran dan rekomendasi bagi penelitian-penelitian yang berhubungan dengan tema atau topik yang sama di masa yang akan datang.

**BAB 2**  
**KONDISI SANITASI DAN AIR BERSIH SERTA**  
**UNICEF DI NUSA TENGGARA BARAT**

Bab 2 dalam skripsi ini akan membahas mengenai kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta faktor dan dampak buruk sanitasi dan minimnya ketersediaan air bersih di wilayah tersebut. Selain itu, bab ini akan mengulas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam upaya meningkatkan sanitasi dan ketersediaan air bersih. Selain itu, pembahasan mengenai *Country Program Action Plan* (CPAP) dan WASH UNICEF di Nusa Tenggara Barat juga akan dikaji dalam bab ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konteks sanitasi dan air bersih di NTB.

**2.2 Kondisi Sanitasi dan Air Bersih di Nusa Tenggara Barat**

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan berkelanjutan terkait sanitasi dan ketersediaan air bersih. Menurut data dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak dalam hal ini jamban sehat, hingga tahun 2019 baru mencapai 88,6%. Sedangkan sarana air minum yang memenuhi syarat hingga tahun 2019 baru mencapai 39,3% (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021).

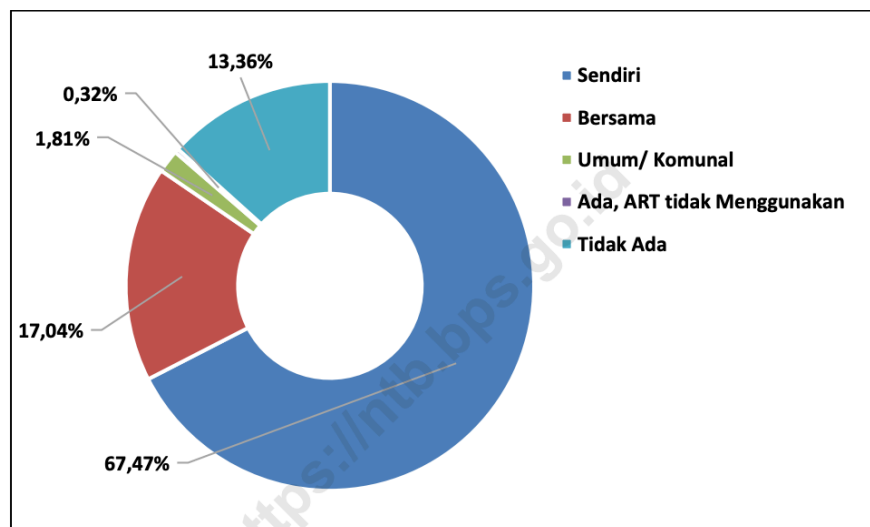
**Gambar 2. Jumlah KK Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Tahun 2019**

NO	KABUPATEN	PUSKESMAS	JUMLAH KK	SHARING/KOMUNAL		JAMBAAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP)		JAMBAAN SEHAT PERMANEN (JSP)		KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAAN SEHAT)	
				JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH KK PENGGUNA	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lombok Barat	19	213.885	13.474	22.381	20.880	30.277	112.498	148.835	201.493	94,21
2	Lombok Tengah	28	321.846	106	284	170.596	14.848	191.298	263.674	278.806	86,63
3	Lombok Timur	32	352.229	13.341	21.453	19.419	35.419	165.486	241.955	298.827	84,84
4	Sumbawa	25	127.260	1.038	16.858	2.255	2.877	82.988	91.114	110.849	87,10
5	Dompu	9	62.365	7.592	7.210	13.100	14.489	33.435	34.524	56.223	90,15
6	Bima	21	122.855	24.546	24.546	11.246	11.246	78.457	78.457	114.249	92,99
7	Sumbawa Barat	9	34.330	298	298	2.134	2.134	26.564	31.898	34.330	100,00
8	Lombok Utara	8	71.544	5.083	15.316	11.730	11.730	34.032	34.032	61.078	85,37
9	Kota Mataram	11	141.703	5.451	16.353	5.346	5.346	103.802	103.802	125.501	88,57
10	Kota Bima	7	39.020	3.095	9.566	343	343	25.886	25.886	35.795	91,74
<b>JUMLAH (KAB/KOTA)</b>			<b>1.487.037</b>	<b>74.024</b>	<b>134.265</b>	<b>257.049</b>	<b>128.709</b>	<b>854.446</b>	<b>1.054.177</b>	<b>1.317.151</b>	<b>88,58</b>

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Dapat dilihat pada gambar tabel di atas bahwasanya terdapat 1.487.037 jumlah Kartu Keluarga (KK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akses rumah tangga masyarakat NTB terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) menyentuh angka 88,58% atau digenapkan menjadi 88,6% dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.317.151. Artinya masih terdapat sebanyak 169.886 Kartu Keluarga (KK) yang tidak sama sekali memiliki akses fasilitas sanitasi layak (jamban sehat).

**Gambar 3. Persentase Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2019**



Sumber: Susenas Maret 2019

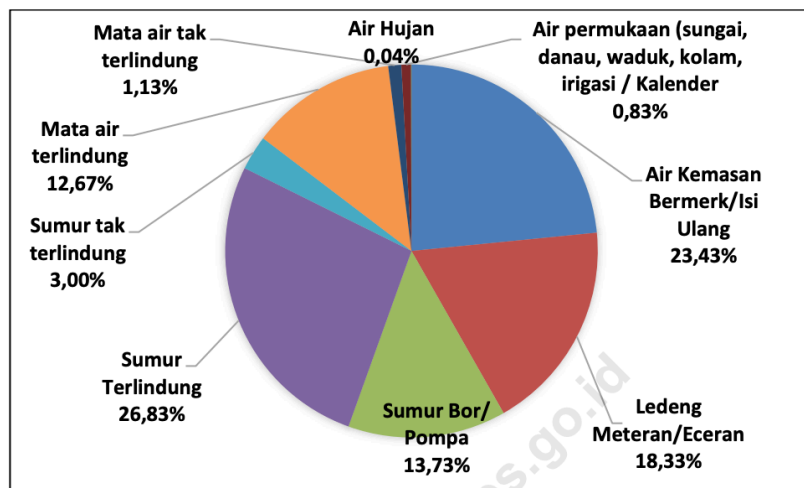
Diperkuat dengan data dari Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, sebagian besar rumah tangga di NTB sudah memiliki fasilitas jamban pribadi, mencapai 67,47%. Terdapat juga sebagian masyarakat NTB menggunakan fasilitas BAB bersama dengan tetangga sebesar 17,04 %. Hal tersebut merupakan peningkatan yang signifikan jika dilihat dari kondisi kepemilikan fasilitas jamban pribadi tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki fasilitas BAB pribadi sekitar 1.81%, sehingga mereka menggunakan toilet umum/komunal untuk melakukan BAB. Kemudian masih terdapat 13.36% atau sekitar 169.886 masyarakat NTB tidak memiliki fasilitas BAB sama sekali, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat NTB masih melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2020).

Masih terdapat rumah tangga di NTB yang tidak memiliki akses fasilitas sanitasi tentunya berpotensi mengakibatkan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di berbagai lokasi seperti ladang, semak-semak, hutan, parit, jalanan, sungai, atau area terbuka lainnya (UNICEF Indonesia 2019). Hal ini dapat menyebabkan masyarakat NTB memiliki risiko tinggi untuk terpapar berbagai bakteri dan penyakit yang berasal dari lingkungan yang terkontaminasi oleh tinja manusia, seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio (World Health Organization 2023). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan status gizi pada balita yang pada akhirnya berdampak pada stunting dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Dalam hal ketersediaan air bersih juga NTB masih mengalami tantangan. Menurut data dari Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019, dalam

memenuhi kebutuhan air minum masyarakat NTB rata-rata menggunakan air yang berasal dari sumur terlindung yaitu sebesar 26,83% dan menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang sebesar 23,4%. Namun masih terdapat masyarakat NTB yang tidak dapat mengakses air bersih, sehingga 0,83% masyarakat mengandalkan air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), dan 1,13% menggunakan mata air tak terlindung (Badan Pusat Statistik Provinsi NTB 2020).

**Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Minum Tahun 2019**



Sumber: Susenas Maret 2019

Air permukaan seperti sungai sudah banyak terkontaminasi oleh tinja manusia akibat perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Akibatnya sungai menjadi tercemar dan berkurang kualitasnya karena berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit seperti diare. (Suara NTB 2020). Hal ini diperkuat oleh data dari UNICEF yang memaparkan bahwa terdapat 89% sumber air minum di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat tercemar oleh tinja.

Berdasarkan data kondisi sanitasi di NTB dapat terlihat bahwa hal ini masih menjadi tantangan besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih agar dapat mencapai

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan juga *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menargetkan sanitasi dan ketersediaan air bersih yang aman bagi semua.

### **2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Buruknya Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih di NTB**

Faktor-faktor yang menyebabkan buruknya sanitasi dan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggambarkan tantangan yang kompleks dalam memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi penduduknya khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya akses fasilitas sanitasi dan air bersih di NTB:

Faktor yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Berdasarkan data dari UNICEF, ketidakmampuan finansial membatasi orang tua untuk memberikan akses air minum dan sanitasi yang layak kepada anak-anak mereka, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan terkena penyakit diare akibat perilaku hidup bersih yang buruk. Tingkat kemiskinan dan ketidakmampuan finansial sangat berpengaruh karena masyarakat NTB mengalami kesulitan ekonomi dalam membangun dan memelihara fasilitas sanitasi yang layak. Sebagian masyarakat NTB yang berpendapatan rendah mengalami kesulitan dalam mengakses sanitasi dan air bersih. Tingginya tingkat kemiskinan di NTB menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi NTB. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, tingkat kemiskinan di NTB mencapai 13,88% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 705.680 penduduk. Akses terhadap sanitasi merupakan indikator penting dalam menentukan status

sosial masyarakat. Masyarakat yang berada dalam kondisi miskin akan sangat kesulitan dalam membangun fasilitas sanitasi yang layak secara mandiri, dikarenakan biaya pembangunan fasilitas sanitasi yang tidak terjangkau bagi mereka. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah bergantung pada bantuan pihak lain untuk membangun akses fasilitas sanitasi yang layak (Purnomo, Hernidiah, dan Aziz 2020).

Faktor yang kedua, yaitu kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalani pola hidup bersih adalah salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas sanitasi yang memadai. Masyarakat Provinsi NTB masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan mengenai sanitasi sehingga kesadaran akan lingkungan dan hidup bersih pun belum dapat terlaksana dengan baik (Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019). Masyarakat NTB masih banyak yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan di selokan atau parit dekat rumahnya dan menganggap bahwa hal tersebut lumrah untuk dilakukan, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai dampak buruk dari melakukan buang air besar sembarangan yang mencemari sungai tempat mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci baju, mencuci piring dan lain sebagainya (UNICEF Indonesia 2020). Untuk air minum sehari-hari pun masyarakat mengandalkan sungai yang sama, serta sumber air tanah lain yang telah terkontaminasi (UNICEF Indonesia 2020). Kurangnya edukasi masyarakat NTB terhadap perilaku hidup bersih dan sehat disebabkan oleh kegiatan penyuluhan mengenai sanitasi dan air bersih yang jarang dilakukan. Sehingga masyarakat NTB tidak mengetahui secara terperinci bagaimana cara mengelola sanitasi dan air bersih yang baik dan aman.

Faktor yang ketiga, yaitu kurangnya infrastruktur. Kurangnya infrastruktur terkait sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih menjadi faktor penting dalam rendahnya akses masyarakat NTB terutama anak-anak dan kelompok rentan dalam mengakses fasilitas sanitasi dan air bersih. Ir. Ridwan Syah MSC., MM., MTP., selaku Asisten II Setda Provinsi NTB mengatakan bahwa pada tahun 2019 anggaran tahunan yang dialokasikan untuk air bersih dan sanitasi hanya sebesar 0,54% dari total anggaran provinsi. Pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan air limbah tergolong mahal dan membutuhkan banyak biaya (UNICEF Indonesia 2020). Maka dari itu, diperlukan bantuan kerjasama multipihak antara Provinsi NTB dengan mitra dalam hal pembangunan infrastruktur sanitasi di NTB.

Berdasarkan Faktor-faktor penyebab buruknya sanitasi dan air bersih di NTB, dapat disimpulkan bahwa NTB sebagai provinsi masih harus meningkatkan fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, dan meningkatkan infrastruktur sanitasi sebagai upaya dalam memperbaiki kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih bagi penduduknya.

### **2.2.2 Dampak dari Buruknya Sanitasi dan Air Bersih di NTB**

Kondisi yang memprihatinkan terkait sanitasi dan ketersediaan air bersih tentunya sangat berdampak bagi masyarakat, terutama anak-anak. Sebesar 90% orang terhubung dengan fasilitas sanitasi yang buruk yang dapat mencemari lingkungan dan memberikan dampak negatif bagi anggota rumah tangga, dan kelompok yang paling rentan adalah anak-anak (UNICEF dan Bappenas 2024). Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk dari

sanitasi yang tidak memadai dan kurangnya akses air bersih, karena hal ini berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan mereka yang berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya.

Menurut laporan UNICEF tahun 2019, diketahui terdapat tiga dampak secara umum yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi, di antaranya adalah dampak kesehatan dan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan juga pendidikan. Provinsi NTB juga mengalami dampak yang luas dari masalah sanitasi dan air bersih yang buruk, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan dan lingkungan, ekonomi, serta pendidikan. Berikut adalah dampak buruk dari minimnya akses sanitasi dan air bersih di NTB:

Dampak yang pertama meliputi dampak kesehatan dan lingkungan. Dalam segi kesehatan masyarakat dan lingkungan, Minimnya akses sanitasi dan air bersih ini berdampak pada penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan atau *water borne diseases* yang berhubungan dengan air bersih dan sanitasi seperti seperti kolera, diare, disentri, hepatitis A, tifus, dan polio (World Health Organization 2023). Diantara penyakit tersebut, Diare menduduki peringkat pertama sebagai penyakit yang paling umum atau sering terjadi akibat buruknya sanitasi dan air bersih. Diperkuat dengan data dari UNICEF Indonesia pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa setiap tahun nya terdapat 140.000 balita meninggal akibat penyakit diare (Veska 2020). Data UNICEF Indonesia juga memaparkan bahwa diare merupakan sumber kematian utama bagi anak-anak di bawah umur lima tahun (UNICEF Indonesia 2019).

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami dampak dari buruknya sanitasi ini. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019, diare termasuk ke dalam 10 penyakit teratas yang menyebabkan kematian di Provinsi NTB.

**Tabel 1. 10 Besar Penyakit di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019**

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas	174.213
2	Penyakit Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi	108.127
3	Gastritis	55.956
4	Infeksi pada saluran pernafasan bagian atas (ISPA)	51.604
5	Diare (termasuk tersangka kolera)	48.205
6	Diabetes Mellitus	41.841
7	<i>Common Cold</i>	40.790
8	<i>Myalgia</i>	30.178
9	<i>Dispepsia</i>	29.414
10	Rematik	26.380

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2019

Sebagai salah satu contoh kasus dari seorang anak bernama Feby yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terkena penyakit diare dan tifus secara bersamaan akibat buruknya sanitasi dan tidak mempunyai akses ke jamban atau toilet (UNICEF Indonesia 2020). Diketahui sebelumnya bahwa Feby beserta keluarganya selalu melakukan buang air besar di parit atau di selokan dekat rumah yang tak jarang limbahnya langsung masuk ke sungai tempat warga melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci piring, dan juga mencuci baju dan untuk air minum sehari-hari pun mengandalkan sungai yang sama, dimana hal tersebut mengindikasikan adanya pencemaran terhadap air yang telah

terkontaminasi oleh tinja (UNICEF Indonesia 2020). Data dari UNICEF juga memaparkan bahwa terdapat 89% sumber air minum di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat telah tercemar oleh tinja.

Dampak yang kedua adalah dampak ekonomi. Selain berdampak pada kesehatan, dampak buruk dari sanitasi dan air bersih dapat dilihat dari segi ekonomi. Dampak buruk dari segi ekonomi dapat dilihat dari adanya ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat NTB mengenai tercapainya akses rumah tangga terhadap fasilitas sanitasi. Kurangnya akses terhadap sanitasi dan air bersih dapat memberikan beban tambahan pada keluarga karena harus mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Salah satu contoh kasusnya adalah keluarga Bapak Suryatul Handi di Nusa Tenggara Barat yang merasa kesulitan ekonomi untuk membangun fasilitas sanitasi dan air bersih. Bapak Suryatul dan Istrinya yang bernama Sri memaparkan bahwa hasil upah dari pekerjaannya sebagai buruh tani hanya cukup untuk membeli makan, sabun, dan kebutuhan dasar lainnya, sedangkan untuk pembangunan jamban dan pipa air minum mereka belum menyanggupinya (UNICEF Indonesia 2020).

Dampak ketiga dari buruknya sanitasi dan air bersih adalah dampaknya terhadap pendidikan. Menurut data dari UNICEF, sekitar 79% sekolah di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat, kekurangan akses terhadap air bersih (UNICEF Indonesia 2020). Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang buruk dapat mempengaruhi pendidikan, terutama bagi anak-anak yang sering kali harus absen sekolah karena menstruasi atau harus menggunakan waktu yang lebih lama untuk mencari air bersih. Berdasarkan data dari penelitian *SMERU Research*

*Institute* mengenai praktik Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) Siswa SD dan SMP di Indonesia (DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat) terdapat korelasi atau hubungan antara fasilitas sanitasi di sekolah dengan tingkat absensi siswa perempuan saat menstruasi. minimnya fasilitas sanitasi di sekolah menyebabkan siswa perempuan memilih untuk tidak mengganti pembalut di sekolah, memutuskan untuk absen sekolah, dan bahkan terjadi beberapa kasus hingga putus sekolah (Dewi, Pramana, dan Hastuti 2019). Data dari UNESCO juga menyebutkan bahwa 1 dari 5 anak perempuan putus sekolah akibat fasilitas sanitasi yang tidak memadai. Selain itu data dari UNICEF juga memaparkan bahwa hanya 45% sekolah di Nusa Tenggara Barat yang memiliki fasilitas toilet terpisah antara perempuan dan laki laki.

Hal tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak perempuan terhadap pendidikan sekaligus kebersihan dan kesehatan. Buruknya fasilitas sanitasi dan akses air bersih tidak hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga dapat membatasi kesempatan pendidikan, terutama bagi anak perempuan, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya kemajuan dan pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan dampak-dampak dari buruknya sanitasi di NTB, dapat disimpulkan bahwa isu mengenai sanitasi yang buruk ini merupakan urgensi bagi pemerintah provinsi NTB. Isu ini memerlukan keterlibatan multipihak antara masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB, Mitra Pembangunan, dan Organisasi Internasional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kolaborasi yang kuat dan terarah akan memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif, pembangunan infrastruktur yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran

masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan air bersih. Dengan demikian, diharapkan akses terhadap sanitasi yang layak dan air bersih dapat ditingkatkan secara signifikan, membawa dampak positif pada kesehatan, ekonomi, dan pendidikan masyarakat di NTB.

### **2.3 Respons Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam isu Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih**

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya untuk mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah upaya bersama secara nasional dan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 17 tujuan dan target global yang ditargetkan pada tahun 2030 (SDGs Indonesia 2015). *Sustainable Development Goals* dideklarasikan oleh negara-negara baik negara maju dan negara berkembang dalam sidang umum PBB pada September 2015 (SDGs Indonesia 2015). Salah satu tujuan dalam perbaikan sanitasi dan air bersih tertuang dalam tujuan no.6 yaitu *clean, water, and sanitation* yang memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, yaitu Indonesia berkomitmen untuk menetapkan target 100% akses air minum yang layak, dengan 15% diantaranya merupakan akses air minum yang aman, serta 30% akses air minum melalui perpipaan. Selain itu, dalam lima tahun ke depan, rencana tersebut juga bertujuan untuk mencapai 90% akses sanitasi yang layak, termasuk 15% akses sanitasi aman, serta penghentian praktek Buang Air

Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% (Kementerian PPN/BAPPENAS 2021). Pemerintah pusat telah menetapkan target RPJMN periode 2020-2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan target 100% air minum layak, 84% sanitasi layak dengan 11% sanitasi aman, dan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) menjadi 0% (Fian 2023).

Dalam mewujudkan target RPJMN periode 2020-2024 terkait perbaikan sanitasi dan ketersediaan air bersih, dilakukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014).

Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sanitasi dan air bersih juga mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 yang mengusung visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dengan salah satu misinya adalah “NTB Sehat dan Cerdas” dengan meningkatkan akses sanitasi yang layak untuk mencapai sanitasi aman di tahun 2023. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebijakan STBM diterjemahkan menjadi gerakan BASNO. BASNO merupakan program kebijakan Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter dalam mendapatkan akses yang layak dan aman terhadap sanitasi (Oka dan Sidhi 2021). Gerakan BASNO ini melakukan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (POKJA AMPL Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020). Pemerintah

Provinsi NTB juga menjalin kerjasama dengan beberapa mitra nasional dan internasional, salah satunya adalah UNICEF atau United Nations Children's Fund.

#### **2.4 Kerja sama UNICEF-RI dalam Country Program Action Plan (CPAP)**

UNICEF merupakan singkatan dari *United Nations International Children's Emergency Fund* atau Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1953 UNICEF memiliki misi yang lebih luas dan fokus dana UNICEF beralih ke program-program umum untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang masih berkembang dan dalam situasi darurat. Melalui misi yang baru, UNICEF resmi mengganti namanya menjadi *United Nations Children's Fund* atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children's Fund 2020).

Pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan UNICEF yang ditandatangani dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) atau Rencana Aksi Program Kerja periode 2021-2025 (Kementerian PPN/Bappenas 2020). Penandatanganan kerja sama tersebut diwakili oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Perwakilan dari UNICEF Indonesia Debora Comini (Kementerian PPN/Bappenas 2020). Kerja sama RI-UNICEF dalam CPAP ini merupakan upaya untuk mempercepat realisasi hak anak, mendukung implementasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Kementerian PPN/Bappenas 2020).

Pungkas Ali Bahjuri selaku Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/BAPPENAS mengatakan bahwa program kerja sama UNICEF-RI ini akan difokuskan pada percepatan pemenuhan hak anak melalui program pendidikan, kesehatan, gizi, dan juga *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) (Kementerian PPN/Bappenas 2020). Kerja sama RI-UNICEF dalam CPAP ini melibatkan delapan provinsi untuk mendukung dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan hak anak di wilayah masing-masing. Delapan provinsi tersebut diantaranya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Papua, dan Papua Barat (Kementerian PPN/Bappenas 2020).

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan UNICEF mencerminkan komitmen kuat antara kedua belah pihak dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak-anak di Indonesia.

#### **2.4.1 WASH UNICEF di Nusa Tenggara Barat**

Tujuan kerja sama RI-UNICEF di Nusa Tenggara Barat selain untuk mempercepat realisasi hak anak, mendukung implementasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024, dan Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerja sama ini juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat periode 2019-2023. Diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Bappeda Provinsi NTB yaitu Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si dalam rapat koordinasi manajemen daerah, bahwa kerjasama UNICEF-Indonesia di NTB tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan kelangsungan

hidup anak, tetapi juga untuk mendukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam tujuan nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, dan tujuan nomor 6 yaitu memastikan akses semua orang terhadap air bersih dan sanitasi yang layak (BAPPEDA Kota Bima 2023)

Berdasarkan refleksi dari KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 24, Semua anak berhak mendapatkan standar tertinggi dalam perawatan kesehatan dan medis, akses terhadap air bersih, makanan bergizi, serta lingkungan hidup yang bersih dan aman. Selain itu, baik anak-anak maupun orang dewasa harus memiliki akses terhadap informasi mengenai cara merawat kesehatan mereka (UNICEF Indonesia 2019).

Dalam memastikan akses semua orang terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, UNICEF memberikan bantuan melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) merupakan sebuah program dari UNICEF untuk upaya meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan juga kebersihan dengan tujuan untuk kesejahteraan ibu dan anak dengan memperbaiki layanan air minum dan sanitasi yang layak di seluruh dunia (Purnomo, Hernidiah, dan Aziz 2020). Dalam program WASH, UNICEF memberikan dukungan meliputi advokasi, bantuan kebijakan, peningkatan kapasitas dan sistem kelembagaan inovasi, komunikasi perubahan perilaku, serta kemitraan untuk meningkatkan akses terhadap layanan WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) di masyarakat (UNICEF Indonesia 2023).

Program WASH untuk mendukung sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah dilaksanakan sejak tahun 2017

untuk mempercepat status BABS atau bebas buang air besar sembarangan (The 10th World Water Forum 2024). Implementasi WASH UNICEF di NTB dilakukan bersama dengan beberapa mitra pembangunan, yaitu Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI), Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) NTB, dan juga Mitra Samya. Dengan dilaksanakannya program WASH di Nusa Tenggara Barat, UNICEF sebagai organisasi internasional bersama dengan para mitra pembangunan menunjukkan komitmen kuat nya untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan masyarakat NTB dalam hal sanitasi dan ketersediaan air bersih secara keseluruhan.

## BAB 3

### IMPLEMENTASI DAN UPAYA UNICEF DALAM

### MEWUJUDKAN SANITASI DAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH DI NTB

Bab 3 akan menganalisis upaya UNICEF sebagai organisasi internasional dalam membantu mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019-2023. Bab ini akan membahas mengenai bagaimana UNICEF mengimplementasikan kebijakannya ke dalam berbagai program sanitasi dan air bersih di NTB menggunakan teori implementasi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *managerial approach* dan *normative approach* dalam implementasi WASH UNICEF dengan upaya mewujudkan sanitasi dan air bersih di NTB. UNICEF berupaya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada pendekatan manajerial, yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan juga *problem solving* dan pendekatan normatif, yaitu legitimasi dan otoritas.

#### **3.1 Management Approach**

Pendekatan manajerial merupakan suatu pendekatan atau perspektif yang bersifat lebih terbuka dan mendukung negara-negara dalam mengembangkan kapasitas untuk mematuhi perjanjian internasional. Pendekatan manajerial memiliki cara yang lebih rasional dengan mempertimbangkan beberapa faktor penyebab suatu negara tidak mematuhi perjanjian internasional. Pendekatan manajerial melakukan pendekatan dengan menekankan pada *problem solving* (penyelesaian masalah), *capacity building* (peningkatan kapasitas), *rule*

*interpretation* (penafsiran peraturan), dan *transparency* (transparansi) (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007).

Alasan penulis menggunakan pendekatan manajerial adalah karena UNICEF sebagai organisasi internasional dalam upaya nya mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB menerapkan *monitoring*, *capacity building*, dan juga *problem solving* sesuai dengan pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial juga lebih bersifat terbuka dan tidak memaksa, sesuai dengan cara UNICEF mengimplementasikan upaya dan program-program nya di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, penulis akan meneliti implementasi organisasi internasional yakni UNICEF dalam mewujudkan sanitasi dan air bersih di NTB melalui tiga pendekatan manajerial:

### **3.1.1 Monitoring**

Sebagai bagian dari *management approach* atau pendekatan manajerial, salah satu peran yang dijalankan oleh organisasi internasional adalah *monitoring* atau pengawasan. Dalam pendekatan manajerial, *monitoring* atau pemantauan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu pemantauan terhadap laporan negara, komite ahli, inspeksi lapangan, dan juga laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007)

Dalam hal ini, UNICEF sebagai organisasi internasional melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap tindakan atau langkah negara Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terkait komitmen nya dalam penyelesaian isu-isu seperti sanitasi dan ketersediaan air bersih dalam kesepakatan nya bersama negara-negara anggota PBB dalam agenda 2030 *Sustainable Development Goals* (SDGs). Isu mengenai sanitasi dan ketersediaan air bersih di

NTB ini menjadi fokus UNICEF dalam meningkatkan perlindungan dan hak anak-anak mengingat betapa urgensi nya kondisi sanitasi dan air bersih di NTB. UNICEF melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap program-program sanitasi dan air bersih di NTB untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam rapat persiapan kegiatan *monitoring* terpadu kementerian dan lembaga di Provinsi NTB dalam program kerja sama RI-UNICEF periode 2021-2025, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari *monitoring* adalah untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program yang didukung oleh UNICEF (Sudarmadi 2023). Dengan kata lain *monitoring* atau pengawasan dilakukan secara teratur untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama implementasi program

Salah satu upaya UNICEF dalam melakukan *monitoring* adalah dengan membentuk tim *Joint Monitoring Program* (JMP). JMP atau *Joint Monitoring Program* merupakan suatu program pemantauan bersama untuk pasokan air, sanitasi, dan kesehatan, yang dikelola oleh WHO dan UNICEF sejak tahun 1990 (WHO dan UNICEF 2021). Tim JMP memiliki strategi lima tahun (2021-2025) yang bertujuan meningkatkan pemantauan global terhadap air minum, sanitasi, dan dan kebersihan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Dapat dikatakan bahwa JMP melakukan pemantauan WASH dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan sebaik-baiknya di Nusa Tenggara Barat.

Tim JMP memiliki peran penting bagi UNICEF dalam memahami kondisi air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) di NTB melalui data dan analisis yang dilakukan oleh tim JMP. Dengan data dari JMP, UNICEF dapat mengetahui daerah-daerah yang paling urgensi untuk dilakukan perbaikan dan juga pemantauan perkembangan dan efektivitas program WASH yang dilaksanakan di NTB. Selain itu, UNICEF juga melakukan *monitoring* atau pemantauan dengan membuat laporan setiap tahunnya dalam *Annual Report* dan *WASH Act* yang dapat diakses oleh semua orang karena UNICEF mengedepankan transparansi dalam proses pengimplementasian program nya sesuai dengan pendekatan manajerial.

#### **3.1.1.1 Monitoring UNICEF Bekerja sama dengan BAPPENAS dan Kementerian PUPR**

Tim *Joint Monitoring Programme* (JMP) UNICEF bekerjasama dengan pemerintah pusat, yaitu perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) dalam melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 3-5 Desember 2019. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap capaian program WASH atau STBM. Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk melakukan advokasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan pengelolaan sanitasi yang aman. Pada kunjungan tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. mengatakan bahwa NTB menyambut baik rencana dukungan dari UNICEF terkait percepatan capaian akses sanitasi dan air bersih di Provinsi NTB termasuk mewujudkan NTB sebagai provinsi yang bebas buang air besar sembarangan (Sekretariat POKJA PPAS 2019).

### **3.1.1.2 Monitoring UNICEF Bekerja sama dengan Mitra Pembangunan (BAZNAS NTB)**

Dalam melakukan monitoring, UNICEF tidak dapat berjalan sendiri dikarenakan UNICEF merupakan aktor eksternal yang membutuhkan arahan dan pendampingan dari pemerintah provinsi NTB, dan juga aktor-aktor lain seperti mitra pembangunan. Mitra pembangunan UNICEF di Provinsi NTB diantaranya adalah Mitra Samya, YKMI, dan PKBI. Maka dari itu berikut adalah kerja sama antara UNICEF dengan Pemerintah NTB dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan monitoring:

Pada tanggal 5 maret 2020, UNICEF bekerja sama dengan mitra pembangunan, yaitu BAZNAS NTB. UNICEF bersama Ir. H. Subhan selaku wakil ketua III BAZNAS NTB melakukan kunjungan lapangan ke Desa Apitaik, Kabupaten Lombok Timur untuk pengambilan foto dan video keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pembuatan jamban. Pengambilan foto dan video ini merupakan upaya UNICEF dalam rangka mengadvokasi masyarakat agar stop melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan menekankan bahwa penggunaan sanitasi yang tidak aman akan berdampak pada munculnya berbagai macam penyakit (Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020). Pengambilan foto dan video dilanjutkan esok hari nya pada Jumat tanggal 6 maret 2020 di Desa Timbe Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Hasil dari foto dan video yang dilakukan oleh UNICEF akan dipublikasikan secara nasional dan internasional untuk kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan menuju sanitasi aman (Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020).

Ketiga, pada tanggal 8 Juni 2023, UNICEF yang diwakilkan oleh Silas Rapold selaku Kepala Perencanaan UNICEF Indonesia melakukan kegiatan *monitoring* terkait program kerjasama RI-UNICEF periode 2021-2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan *monitoring* ini dilakukan di Desa Kota Raja, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk pemantauan program WASH inovatif terkait pembiayaan untuk sanitasi (Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023). Hasil dari kegiatan *monitoring* tersebut, Kepala Desa menyampaikan bahwa dana bantuan dari BAZNAS NTB untuk meningkatkan fasilitas jamban keluarga, sebesar Rp500.000 untuk setiap Kartu Keluarga (KK) kini sudah diterima oleh 192 Kartu Keluarga (KK) (Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023).

Kegiatan *monitoring* yang dilaksanakan oleh UNICEF, Pemerintah Provinsi NTB, dan juga mitra pembangunan, yaitu BAZNAS NTB ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman dalam program kerjasama CPAP RI-UNICEF di wilayah NTB. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen dan keinginan pemerintah provinsi NTB dan UNICEF dalam mewujudkan sanitasi yang aman di NTB.

### **3.1.2 Capacity Building and Problem Solving**

*Capacity Building* atau pengembangan kapasitas adalah salah satu implementasi kebijakan organisasi internasional dalam pendekatan manajerial yang dapat mengembangkan kapasitas suatu negara. Menurut pendekatan manajerial, aktor-aktor seperti organisasi internasional dapat memainkan peranan penting dalam implementasi kebijakan karena mereka dapat membantu negara-negara mengembangkan kapasitasnya (Joachim, Reinalda, dan Verbeek

2007). Sedangkan Problem Solving Organisasi internasional memiliki keahlian khusus dalam berbagai bidang, maka organisasi internasional dinilai dapat memberikan bantuan teknis dan juga pemberian bantuan berupa keuangan (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007).

*Capacity building* UNICEF di Nusa Tenggara Barat melibatkan serangkaian program dan inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu, komunitas, lembaga, dan sistem di wilayah tersebut. Menurut data dari UNICEF, Ir. H. Subhan selaku wakil ketua III (Perencanaan dan pelaporan) BAZNAS Provinsi NTB mengatakan bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan kompetensi atau kapasitas sumber daya manusia pada tingkat pelaksanaan, khususnya bagi para sanitarian (Veska 2020). Dalam upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, UNICEF bekerja sama dengan mitra pembangunan lokal untuk memberikan sebuah pelatihan dan mengadvokasi masyarakat NTB dalam upaya mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB. Dengan demikian, *capacity building* UNICEF di NTB bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat serta memastikan mereka dapat merespons perubahan lingkungan dengan lebih efektif

#### **3.1.2.1 Capacity Building melalui WASH**

Pertama, Pada Tahun 2019, UNICEF bersama dengan mitra pembangunan, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) memberikan peningkatan kapasitas WASH dalam edukasi mengenai kebersihan menstruasi kepada anak-anak dengan upaya mendukung fasilitas pendidikan higiene pada korban gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (UNICEF Indonesia

2019). Edukasi WASH mengenai kebersihan menstruasi ini melibatkan sekolah, puskesmas, dinas kesehatan, dan sukarelawan dari kalangan warga. Membersihkan pembalut sebelum membuangnya merupakan sebuah praktik lumrah yang dilakukan di Indonesia, namun semenjak terjadinya gempa, kran air telah mengering sehingga masyarakat merasa khawatir dalam menghadapi keadaan menstruasi dan memilih untuk tidak pergi ke sekolah. Salah satu orang tua menyampaikan kekhawatiran mereka untuk membiarkan anak-anak kembali bersekolah karena takut akan ada gempa susulan, namun orangtua tersebut menambahkan bahwa kegiatan menstruasi memang sudah menjadi rutinitas setiap bulan dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk anak-anak tidak pergi ke sekolah (UNICEF Indonesia 2019). UNICEF memberikan edukasi WASH dengan membuka forum grup diskusi yang bertujuan untuk memberdayakan remaja perempuan dan lelaki dalam pengetahuan mengenai Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dan pubertas. Upaya UNICEF ini mendorong anak-anak perempuan untuk kembali ke sekolah dan meyakinkan mereka bahwa mereka bisa merasa nyaman dengan diri dan tubuhnya (UNICEF Indonesia 2019).

Kedua upaya UNICEF dalam peningkatan kapasitas WASH dari segi pelatihan. Pada tanggal 23-28 Oktober 2020, UNICEF bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan mitra pembangunan lokal, yaitu Mitra Samya dalam memberikan pelatihan 5 pilar STBM di Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka mempercepat pelaksanaan program BASNO (Buang Air Besar Nol). Mitra Samya merupakan mitra pembangunan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan demokrasi yang memiliki tujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (Mitra Samya 2001). Pelatihan 5 pilar STBM tersebut bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas petugas sanitarian dan juga masyarakat NTB untuk menerapkan hidup bersih dan sehat dengan mengubah perilaku menjadi lebih higienis (Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2020).

Ketiga, pada tanggal 21 Agustus 2023, UNICEF bersama dengan mitra pembangunan, yaitu Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dan Pemerintah Provinsi NTB melakukan sosialisasi dokumen *roadmap* 5 pilar STBM. Sebelumnya UNICEF, YKMI, dan POKJA PPAS Provinsi NTB telah menyusun *roadmap* 5 pilar STBM dalam rangka mendukung pemerintah mempercepat capaian 5 pilar STBM. Penyusunan *roadmap* 5 pilar STBM merupakan capaian dari program SEE4WASH yang merupakan bagian dari dukungan UNICEF di wilayah NTB dengan bekerja sama dengan YKMI sebagai mitra pembangunan (Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia 2023). Sosialisasi dokumen *roadmap* 5 pilar STBM tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (pengetahuan, keterampilan, kesadaran) para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). serta dalam menggunakan dokumen *roadmap* sebagai perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan juga evaluasi program (Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia 2023).

### **3.1.2.2 Bantuan Layanan WASH UNICEF di NTB**

Pertama, pada tahun 2019, UNICEF bekerja sama dengan mitra pembangunan, yaitu PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dalam memberikan bantuan layanan *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) akibat gempa bumi yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (UNICEF Indonesia 2019). Pasca gempa bumi tersebut masyarakat meninggalkan rumah dan

mengungsi di tenda. Salah satu kekurangan dari mengungsi di tenda adalah tidak adanya pembalut dan fasilitas sanitasi yang memadai. Seorang anak perempuan bernama Kadek Ariasti Widhiari menyampaikan keluhan nya pada pihak UNICEF bahwa selama berada di tenda tidak ada pembalut dan tidak ada toko yang buka setelah gempa bumi terjadi, sehingga Kadek harus menggunakan kain atau menggunakan popok milik adiknya untuk menampung menstruasi, Kadek merasa tidak nyaman, tidak berdaya, takut, dan kesakitan (UNICEF Indonesia 2019). Seorang anak lain juga menyampaikan keluhan bahwa ia merasa sayang mencuci pembalutnya menggunakan air minum yang dianggapnya begitu berharga karena tidak ada air keran selama pengungsian di tenda. Melihat hal tersebut UNICEF dan PKBI memberikan bantuan prasarana terkait air bersih, sanitasi dan kebersihan. Bantuan prasarana tersebut berupa toilet sementara, tempat sampah, perlengkapan kebersihan seperti sabun, handuk, dan pakaian dalam kepada orang-orang yang terdampak dari bencana gempa bumi yang mana mereka kesulitan untuk mengakses air bersih dan fasilitas sanitasi lainnya (UNICEF Indonesia 2019).

Kedua, pada tahun 2020 UNICEF bersama dengan mitra pembangunan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) bekerja sama dalam memberikan bantuan layanan *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) dengan memberikan bantuan pembangunan jamban bagi 100 rumah tangga dengan menggunakan tangki septik biopam dan jamban jongkok di Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Desa tersebut merupakan desa yang masih memiliki angka tinggi dalam praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (Purnomo, Hernidiah, dan Aziz 2020). Penerima bantuan jamban dari

UNICEF dan YKMI dilihat berdasarkan keluarga yang tidak memiliki toilet atau toilet yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi, memiliki anak balita yang menderita stunting, dan masuk dalam kategori masyarakat miskin (Purnomo, Hernidiah, dan Aziz 2020). Proses pemasangan jamban biopam ini melibatkan masyarakat dengan melakukan gotong-royong. Sebelumnya, masyarakat diberikan pelatihan terlebih dahulu mengenai cara pemasangan tangki septik oleh vendor biopam. Beberapa masyarakat penerima bantuan jamban mengatakan bahwa bantuan ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan kualitas hidup mereka untuk melakukan buang air besar secara teratur tanpa rasa malu. Sebelumnya, beberapa di antara mereka hanya melakukan buang air besar sekali selama seminggu dan menahannya hingga malam hari agar tidak malu melakukan buang air besar di tempat terbuka. Upaya UNICEF dan YKMI ini mendukung pada pencapaian NTB BASNO 2023 dengan pendekatan jamban aman dan slogan *no one left behind* (Purnomo, Hernidiah, dan Aziz 2020).

Ketiga, pada tahun 2020 UNICEF bekerja sama dengan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dalam program COVID-19 *WASH RESPONSE* yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 melalui aspek *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Salah satu cara mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah melalui cuci tangan pakai sabun. Yudhistira Yewangoe selaku Kepala Kantor UNICEF Perwakilan NTT-NTB mengatakan bahwa aspek *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) merupakan kunci dalam pencegahan COVID-19 yang paling efektif (Hawari 2021). Selama lima bulan program COVID-19 *WASH RESPONSE* berlangsung, UNICEF dan YKMI telah mendistribusikan sebanyak 2000 unit *hygiene kit* untuk 10 Kabupaten/Kota di

Provinsi NTB. *Hygiene kit* tersebut berisikan berbagai perlengkapan seperti cairan disinfektan lantai, botol penyemprot, kain pembersih *microfiber*, sabun antiseptik, lap tangan gantung, gunting kuku, pembalut wanita, masker kain yang *reusable* dengan tali pengait telinga dan 3 lapisan, jerigen volume 10 liter, serta lembar *leaflet* kesehatan lingkungan (Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia 2020). Dengan bantuan *hygiene kit*, harapannya masyarakat akan terus menjaga kesehatan diri dan keluarganya sebagai langkah pencegahan penularan virus COVID-19.

### **3.2 Normative Approach**

*Normative approach* atau pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan kekuatan normatif organisasi internasional dalam upaya mempengaruhi negara-negara untuk mematuhi perjanjian internasional yang sudah disepakati bersama. *Normative approach* menggunakan argumen yang logis untuk meyakinkan negara-negara bahwa mematuhi perjanjian internasional adalah hal yang tepat dan benar untuk dilakukan. Pendekatan ini mencoba untuk membangun legitimasi dan otoritas dengan menunjukkan bahwa mereka adalah sumber kebijakan yang netral dan dapat dipercaya. Pendekatan ini juga mendorong negara-negara untuk mengikuti standar internasional dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Joachim, Reinalda, dan Verbeek 2007).

Dalam hal ini, UNICEF melakukan pendekatan normatif dengan mendorong negara Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi hak setiap anak terhadap layanan kesehatan, perlindungan, dan pendidikan melalui hukum, kebijakan, dan juga layanan (UNICEF Indonesia 2019). UNICEF

mendukung pemerintah Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat dalam mempercepat akses terhadap fasilitas *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) yang dikelola secara aman. UNICEF melakukan penelitian dan menerbitkan laporan untuk membentuk arah kebijakan, saran tentang perencanaan, pendanaan, dan penyediaan layanan secara merata kepada 80 juta anak yang paling rentan di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat (UNICEF Indonesia 2019).

### **3.2.1 Otoritas dan Legitimasi UNICEF dalam Implementasi WASH di Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan refleksi dari KHA (Konvensi Hak Anak) Pasal 24, Semua anak berhak mendapatkan standar tertinggi dalam perawatan kesehatan dan medis, akses terhadap air bersih, makanan bergizi, serta lingkungan hidup yang bersih dan aman. Selain itu, baik anak-anak maupun orang dewasa harus memiliki akses terhadap informasi mengenai cara merawat kesehatan mereka (UNICEF Indonesia 2019).

UNICEF sebagai lembaga PBB yang didukung secara internasional memiliki kredibilitas yang tinggi dalam melakukan advokasi perubahan perilaku sosial dalam hal sanitasi dan air bersih sebagai bagian dari hak anak-anak. UNICEF juga memiliki otoritas dan legitimasi dikarenakan telah secara resmi bekerja sama dengan Indonesia dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) yang berfokus pada percepatan hak anak yang salah satunya adalah *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Maka dari itu, UNICEF sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB memiliki legitimasi dan otoritas yang kuat dalam mengimplementasikan *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) di Nusa Tenggara Barat.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang mengedepankan hak anak telah berupaya meyakinkan negara Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat melalui advokasi tingkat tinggi dan peningkatan kemauan politik untuk menciptakan norma sosial dalam mendukung sanitasi yang dikelola secara aman dengan menyelaraskan kebijakan dan program WASH dengan kondisi nyata di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada informasi dan data yang andal dan terkini (UNICEF Indonesia 2019).

UNICEF mendorong perubahan perilaku sosial melalui advokasi dan bekerja sama dengan berbagai kemitraan sanitasi dan air bersih, pembelajaran peer to peer untuk mendukung advokasi di tingkat daerah dan mobilisasi sosial di masyarakat yang terpinggirkan di mana praktik buang air besar sembarangan masih umum terjadi. UNICEF telah melakukan tindakan preventif melalui advokasi perubahan perilaku sosial kepada masyarakat NTB yang masih menerapkan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan tidak menggunakan sumber air minum yang dikelola secara aman dengan bekerja sama dengan mitra pembangunan, yaitu Mitra Samya, YKMI, PKBI, dan BAZNAS NTB.

Dengan menggunakan legitimasi dan otoritasnya, UNICEF mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam menangani isu sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB melalui *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH) untuk meningkatkan akses sanitasi dan air bersih yang aman dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

UNICEF sebagai organisasi internasional memiliki peran yang signifikan dalam implementasi WASH untuk membantu mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui pendekatan manajerial dan pendekatan normatif. Dalam pendekatan manajerial UNICEF mengimplementasikan kebijakannya dengan fokus pada *monitoring*, *capacity building*, dan juga *problem solving*.

**Tabel 2. Implementasi Kebijakan Organisasi UNICEF dalam Mewujudkan Sanitasi dan Ketersediaan Air Bersih di NTB**

Teori	Implementasi Teori
<i>Monitoring</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● UNICEF bekerja sama dengan BAPPENAS, PUPR, dan WHO dalam kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan <i>monitoring</i> program WASH atau STBM.</li><li>● UNICEF bekerja sama dengan BAZNAS NTB dalam kunjungan ke Desa Apitaik untuk pengambilan foto dan video keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pembuatan jamban.</li><li>● UNICEF melakukan <i>monitoring</i> ke Desa Kota Raja untuk pemantauan program WASH inovatif terkait pembiayaan sanitasi yang merupakan bantuan dana dari BAZNAS NTB.</li></ul>
<i>Capacity Building</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>● UNICEF meningkatkan kapasitas dalam mengedukasi murid sekolah sebagai korban dari bencana gempa bumi di NTB.</li><li>● UNICEF bekerja sama dengan Mitra Samya dalam memberikan pelatihan 5 pilar STBM di Kabupaten Sumbawa Barat.</li><li>● UNICEF bersama dengan Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia (YKMI) dan Pemerintah Provinsi NTB melakukan sosialisasi dokumen <i>roadmap</i> 5 pilar STBM.</li></ul>

<i>Problem Solving</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UNICEF bekerjasama dengan PKBI dalam memberikan bantuan fasilitas WASH kepada para korban gempa bumi di Lombok.</li> <li>● UNICEF bersama dengan YKMI bekerja sama dalam pengadaan jamban bagi 100 rumah tangga dengan menggunakan tangki septik biopam dan jamban jongkok di Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.</li> <li>● UNICEF bekerja sama dengan YKMI dalam program COVID-19 <i>WASH RESPONSE</i> dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19. dengan memberikan bantuan 2000 <i>hygiene kit</i></li> </ul>

Pertama dalam hal *monitoring* UNICEF secara aktif melakukan pemantauan terhadap program-program sanitasi dan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan berjalannya program sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan mitra pembangunan yaitu Mitra Samya, YKMI, PKBI, dan BAZNAS NTB, UNICEF melakukan *monitoring* terpadu untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang mungkin terjadi selama implementasi program berlangsung.

Kedua, dalam upaya *capacity building* UNICEF melaksanakan serangkaian program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, lembaga, dan sistem di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan kerja sama dengan mitra lokal untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di NTB terkait sanitasi dan air bersih.

Ketiga, dalam *problem solving* UNICEF memberikan bantuan teknis dan keuangan serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan mitra

pembangunan yaitu Mitra Samya, YKMI, PKBI, dan BAZNAS NTB terkait penyelesaian permasalahan sanitasi dan air bersih di NTB. Upaya ini meliputi pemberian fasilitas sanitasi dan air bersih pasca gempa, penyediaan fasilitas jamban bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk ke dalam kategori miskin, serta distribusi *hygiene kit* untuk mencegah penularan virus COVID-19.

Dalam pendekatan normatif, UNICEF telah berhasil mengimplementasikan WASH melalui otoritas dan legitimasinya. Dengan adanya otoritas dan legitimasi, maka UNICEF dapat melakukan advokasi tingkat tinggi kepada Provinsi NTB dalam mengubah perilaku sosial terkait sanitasi dan air bersih bersama dengan mitra pembangunan, yaitu Mitra Samya, YKMI, PKBI, dan BAZNAS NTB.

UNICEF melalui pendekatan manajerial yang meliputi *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving* dan pendekatan normatif melalui legitimasi dan otoritas telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih melalui Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) dalam rentang waktu tahun 2019-2023. UNICEF terlibat secara aktif dengan memperkuat infrastruktur sanitasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi, serta memberikan bantuan atau solusi terkait permasalahan sanitasi dan air bersih di Provinsi NTB. Sebagai hasil dari upaya UNICEF ini, Provinsi NTB berhasil mencapai Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam target sanitasi layak dan menjadi provinsi ke-2 di Indonesia yang

mencapai status *Open Defecation Free* (ODF) atau bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki fokus pada bidang sanitasi dan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Penulis mengakui adanya kekurangan dalam penulisan penelitian ini dikarenakan penulis hanya menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi UNICEF, situs web resmi UNICEF, situs web resmi Pemerintah Provinsi NTB, situs web resmi Bappeda Provinsi NTB, situs web resmi mitra pembangunan, serta situs web resmi lain yang relevan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai bantuan dan program UNICEF di NTB tidak dikupas secara menyeluruh oleh penulis. Penulis menghadapi kesulitan dalam mendapatkan data yang lebih detail mengenai bantuan, capaian, dan tantangan yang dihadapi oleh UNICEF dalam membantu mewujudkan sanitasi dan ketersediaan air bersih di NTB tahun 2019-2023. Meskipun begitu, hal ini dapat menjadi subjek penelitian yang lebih mendalam oleh peneliti-peneliti lainnya di masa depan. Peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan menggunakan data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak UNICEF, Pemerintah Provinsi NTB, Mitra Pembangunan, serta masyarakat NTB itu sendiri. Penggunaan kerangka teori atau kerangka pemikiran lainnya juga dapat digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut sehingga dapat menemukan sudut pandang baru dan lebih beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2020. *Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Joachim, Jutta, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek. 2007. *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* Routledge.
- Oka, I Nyoman, dan Purnama Sidhi. 2021. *Menyemai Benih Perubahan*. [https://mitrasamya.id/eBooks/books/Menyemai%20Benih%20Perubahan%20\(Cetak%20B5\).pdf](https://mitrasamya.id/eBooks/books/Menyemai%20Benih%20Perubahan%20(Cetak%20B5).pdf).

### Jurnal

- Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2013. "Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2013." *Badan Pusat Statistik Provinsi NTB*. <https://ntb.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MzAzMGNjM2ZhNDQ3NDc5NTBkZjI3Y2Uy&xzmn=aHR0cHM6Ly9udGluYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTMvMTEvMDQvMzAzMGNjM2ZhNDQ3NDc5NTBkZjI3Y2UyL251c2EtdGVuZ2dhcmEtYmFyYXQtZGFsYW0tYW5na2EtMjAxMy5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNi0wMSAxMToyMzowOA%3D%3D>.
- Dewi, Rika Kumala, Rezanti Putri Pramana, dan Hastuti. 2019. "Studi Kasus Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) Siswa SD dan SMP di Indonesia."
- Kusumawardhana, Indra, dan Annisa Asti Nur Auliya. 2020. "UNICEF and the WASH: Analisis Terhadap Peran UNICEF Dalam Mengatasi Masalah Ketersediaan Air Bersih di India." *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 1 (2): 341–78. <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.2.341-378.2019>.
- Rudyansyah. 2019. "Peran United Nation Children's Fund (UNICEF) dalam Mengatasi Masalah Sanitasi di Papua." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/02/JURNAL%20Rudyansyah%20\(02-05-20-06-42-30\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/02/JURNAL%20Rudyansyah%20(02-05-20-06-42-30).pdf).
- Widiyanti, Baiq Liana, Ig L Setyawan Purnama, dan Adi Heru Sutomo. 2015. "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Sanitasi Lingkungan di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Geodika* 1 (1).
- Wulandhari, Asri. 2019. "Peranan UNICEF dalam Memulihkan dan Memperbaiki Layanan Air Bersih dan Sanitasi di Aceh." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 9.

### Dokumen

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI. 2013. "Riset Kesehatan Dasar 2013." [https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4467/1/Laporan\\_riskesdas\\_2013\\_final.pdf](https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/4467/1/Laporan_riskesdas_2013_final.pdf).
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. "Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.”  
<https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/Dokumen%20RKPD%20Murni%202022.pdf>.
- POKJA AMPL Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2020. “Roadmap BASNO Menuju Sanitasi Aman Nusa Tenggara Barat 2020-2023.”  
<https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/Roadmap%20BASNO%202020-2023.pdf>.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. “Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015.”  
[https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015\\_ok.pdf](https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015_ok.pdf).
- Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. “Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.”  
<https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/PERUBAHAN%20RPJMD%20PROV%20NTB%202019-2023.pdf>.
- Purnomo, Agus Hery, Nina Hernidiah, dan Syaechu Aziz. 2020. “Sebuah pembelajaran dari program WASH di NTB.”  
[https://kmc.bappeda.ntbprov.go.id/storage/content\\_knowledge\\_attachments/Sebuah%20pembelajaran%20dari%20program%20WASH%20di%20NTB%20\(1\).pdf](https://kmc.bappeda.ntbprov.go.id/storage/content_knowledge_attachments/Sebuah%20pembelajaran%20dari%20program%20WASH%20di%20NTB%20(1).pdf).
- UNICEF Indonesia. 2015. “Profil Singkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.”  
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2019-06/Bahasa%20NTB%20lowres2.pdf>.
- UNICEF Indonesia. 2020. “Situasi Anak di Indonesia Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak.”  
<https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-07/Situasi-Anak-di-Indonesia-2020.pdf>.
- UNICEF Indonesia. 2023. “WASH Act 2023.”  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/20851/file/Kompilasi%20WASH%20Acts%202023.pdf.pdf>.
- UNICEF dan Bappenas. 2024. “Kajian Pasar Sanitasi Aman di Indonesia.”  
 UNICEF Indonesia.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/20831/file/Kajian%20Pasar%20Sanitasi%20Aman%20Indonesia.pdf>.

### **Situs Web**

- BAPPEDA Kota Bima. 2023. “Rapat Koordinasi Manajemen Daerah Program Kerjasama RI-UNICEF Provinsi NTB Tahun 2023.” BAPPEDA Kota Bima. 2023.  
<https://bappeda.bimakota.go.id/web/detail-berita/283/rapat-koordinasi-manajemen-daerah-program-kerjasama-riunicef-provinsi-ntb-tahun-2023>.
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2020. “Nusa Tenggara Barat Menuju Buang Air Besar Sembarang Nol (BASNO) 2023.” Bappeda Provinsi NTB. 6 Maret 2020.  
<https://bappeda.ntbprov.go.id/nusa-tenggara-barat-menuju-buang-air-besar-sembarang-nol-basno-2023/>.
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2023. “Pembiayaan Sanitasi di Lotim

- Jadi Percontohan Inovasi.” Bappeda Provinsi NTB. 8 Juni 2023. <https://bappeda.ntbprov.go.id/pembiayaan-sanitasi-di-lotim-jadi-percontohan-inovasi/>.
- Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. 2020. “Amankah Air Hujan Bagi Kesehatan?” 2020. <https://dinkes.madiunkota.go.id/?p=2469>.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2019. “BASNO.” Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2019. <https://dinkes.ntbprov.go.id/basno/>.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2020. “Bersama NGO (Mitra Samya dan Unicef) Dinas Kesehatan Provinsi NTB tingkatkan Peranan BASNO melalui Pelatihan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).” Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 17 November 2020. <https://dinkes.ntbprov.go.id/berita/bersama-ngo-mitra-samya-dan-unicef-dinas-kesehatan-provinsi-ntb-tingkatkan-peranan-basno-melalui-pelatihan-5-pilar-sanitasi-total-bebasis-masyarakat-stbm/>.
- Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2020. “Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Provinsi NTB.” NTB Satu Data. 5 Oktober 2020. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kk-dengan-akses-terhadap-fasilitas-sanitasi-yang-layak-jamban-sehat-di-provinsi-ntb>.
- Fian. 2023. “Workshop Review Pelaksanaan Sanitasi Aman Provinsi NTB.” Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 19 Desember 2023. <https://bappeda.ntbprov.go.id/workshop-riview-pelaksanaan-sanitasi-aman-provinsi-ntb/>.
- Hawari, Didin. 2021. “UNICEF Berkolaborasi dengan YKMI dan POKJA AMPL NTB.” Portal Berita Harian Radar Lombok. 19 Januari 2021. <https://radarlombok.co.id/unicef-berkolaborasi-dengan-ykmi-dan-pokja-amp1-ntb.html>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. “STBM Kemenkes.” STBM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014. <https://stbm.kemkes.go.id/>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. “Wujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman, Menteri Basuki Dorong Peran Aktif Semua Lapisan Masyarakat.” Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 9 September 2022. [https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas\\_berita/3274/Wujudkan-Akses-Air-Minum-dan-Sanitasi-Aman-Menteri-Basuki-Dorong-Peran-Aktif-Semua-Lapisan-Masyarakat](https://sahabat.pu.go.id/eppid/page/kilas_berita/3274/Wujudkan-Akses-Air-Minum-dan-Sanitasi-Aman-Menteri-Basuki-Dorong-Peran-Aktif-Semua-Lapisan-Masyarakat).
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. “Luncurkan Program Kerja Sama 2021-2025, RI-UNICEF Bersinergi untuk Percepatan Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia.” 2020. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan-hak-anak-di-indonesia>.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2020. “Sepakati CPAP 2021-2025 Senilai US\$ 150 Juta Indonesia-UNICEF Usung 7 Tujuan Kesejahteraan Anak Indonesia.” 2020. <https://bappenas.go.id/berita/sepakati-cpap-2021-2025-senilai-us-150-juta>

- indonesia-unicef-usung-7-tujuan-kesejahteraan-anak-indonesia.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2021. "Tegaskan Komitmen Air Minum dan Sanitasi Aman, Bappenas Bersiap Helat KSAN 2021." 2021. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/tegaskan-komitmen-air-minum-dan-sanitasi-aman-bappenas-bersiap-helat-ksan-2021-2wwS8>.
- Mingst, Karen. 2024. "UNICEF Definition, History, & Facts." 2024. <https://www.britannica.com/topic/UNICEF>.
- Mitra Samya. 2001. "Tentang Kami." 2001. <https://mitrasamya.id/about>.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2022. "NTB Borong Penghargaan Kesehatan Lingkungan STBM Award 2022." 2022. <https://ntbprov.go.id/post/ntb-borong-penghargaan-kesehatan-lingkungan-stbm-award-2022>.
- SDGs Indonesia. 2015. "Apa Itu SDGs?" SDGs Indonesia. 2015. <https://sdgs.bappenas.go.id/>.
- Sekretariat POKJA PPAS. 2019. "Menuju Sanitasi Aman, NTB Siap Pererat Kolaborasi." National Water and Sanitation Information Services. 2019. <https://www.nawasis.org/portal/berita/read/menuju-sanitasi-aman-ntb-siap-pererat-kolaborasi/51650>.
- Suara NTB. 2020. "Buang Limbah Tinja Sembarangan Bisa Ditangkap." 10 Maret 2020. <https://www.suarantb.com/2020/03/10/buang-limbah-tinja-sembarangan-bisa-ditangkap/>.
- Sudarmadi, Aditya. 2021. "Ending Collaboration Program UNICEF di Provinsi Nusa Tenggara Barat." Bappeda Provinsi NTB. 25 Januari 2021. <https://bappeda.ntbprov.go.id/ending-collaboration-program-unicef-di-provinsi-nusa-tenggara-barat/>.
- Sudarmadi, Aditya. 2021. "Peluncuran Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Periode 2021-2025." BAPPEDA Provinsi NTB. 28 Januari 2021. <https://bappeda.ntbprov.go.id/peluncuran-program-kerjasama-pemerintah-indonesia-dengan-unicef-periode-2021-2025/>.
- Sudarmadi, Aditya. 2023. "Laksanakan Monev Terpadu, NTB sambut Tim dari Pusat dan UNICEF." BAPPEDA Provinsi NTB. 6 Juni 2023. <https://bappeda.ntbprov.go.id/laksanakan-monev-terpadu-ntb-sambut-tim-dari-pusat-dan-unicef/>.
- The 10th World Water Forum. 2024. "Program WASH UNICEF di NTB beri kontribusi untuk World Water Forum." 2024. <https://media.worldwaterforum.org/en/contents/berita-660eb081009d7/program-wash-unicef-di-ntb-beri-kontribusi-untuk-world-water-forum-663855807afc3>.
- UNICEF Indonesia. 2018. "Tentang Kami." 2018. <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami>.
- UNICEF Indonesia. 2019. "Air, Sanitasi dan Kebersihan (WASH)." UNICEF Indonesia. 22 Mei 2019. <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash>.
- UNICEF Indonesia. 2019. "Menstruasi di Tengah Masa Darurat." UNICEF Indonesia. 2019. <https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash/cerit>

- a/menstruasi-tengah-masa-darurat.
- UNICEF Indonesia. 2019. “Refleksi dari KHA Pasal 24.” 2019.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/cerita/refleksi-dari-kha-pasal-24>.
- UNICEF Indonesia. 2020. “Pertanyaan Umum.” UNICEF Indonesia. 2020.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/pertanyaan-umum>.
- UNICEF Indonesia. 2020. “Sanitasi Aman untuk Feby.” UNICEF Indonesia. 2020.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash/cerita/sanitasi-aman-untuk-feby>.
- UNICEF Indonesia. 2020. “Sanitasi Aman untuk Feby | UNICEF Indonesia.” 2020.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/air-sanitasi-dan-kebersihan-wash/cerita/sanitasi-aman-untuk-feby>.
- United Nations. 2022. “Water and Sanitation.” United Nations Sustainable Development. 2022.  
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/>.
- United Nations Children’s Fund. 2020. “UNICEF History.” 2020.  
<https://www.unicef.org/history>.
- Veska, Dinda. 2020. “BAZNAS x UNICEF Memberikan akses air minum dan sanitasi aman untuk setiap anak.” UNICEF Indonesia. 22 April 2020.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/baznas-x-unicef>.
- WHO dan UNICEF. 2021. “About the JMP.” WHO UNICEF JMP. 2021.  
<https://washdata.org/how-we-work/about-jmp>.
- World Health Organization. 2023. “Drinking Water.” World Health Organization. 13 September 2023.  
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>.
- Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia. 2020. “Bantu Atasi Corona, UNICEF Dan YKMI Menyerahkan 2.000 Hygiene Kit Kepada Pemprov NTB.” 2020.  
<https://www.ykmi-id.org/bantu-atasi-corona-unicef-dan-ykmi-menyerahkan-2-000-hygiene-kit-kepada-pemprov-ntb/>.
- Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia. 2023. “YKMI Bersama UNICEF Dan PEMPROV NTB Melakukan Sosialisasi Dokumen Roadmap STBM 5 Pilar.” 2023.  
<https://www.ykmi-id.org/ykmi-bersama-unicef-dan-pemprov-ntb-melakukan-sosialisasidokumen-roadmap-stbm-5-pilar/>.